

## Alasan Korea Selatan Meratifikasi Deklarasi Panmunjom tahun 2018

### *The Reason Of South Korea Ratified The Panmunjom Declaration In 2018*

**Stefany Noveliem Herina, Ganjar Widhiyoga, Hasna Wijayati**

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet  
Riyadi Surakarta

[Stefanynh98@gmail.com](mailto:Stefanynh98@gmail.com), [ganjar.widhiyoga@gmail.com](mailto:ganjar.widhiyoga@gmail.com)

#### **Abstrak**

Terbaginya Semenanjung Korea menjadi dua bagian dengan perbedaan ideologi yang dianut menjadi penyebab terjadi Perang Korea pada tahun 1950. Berbagai cara sudah digunakan untuk meredam ketegangan yang telah berlangsung selama 65 tahun dan banyak perjanjian dihasilkan namun, tetap gagal. Hingga pada tahun 2018 Deklarasi Panmunjom disepakati oleh kedua negara. Penelitian ini menjelaskan alasan Korea Selatan menyetujui dan menandatangani Deklarasi Panmunjom. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan dua sumber data, primer dan sekunder berupa buku, artikel dan *report*. Teori yang digunakan adalah Teori Kepentingan Nasional dan Keamanan Internasional dengan konsep *Security Dilemma*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Korea Selatan menyetujui Deklarasi Panmunjom adalah adanya keinginan untuk mewujudkan unifikasi Korea, mengurangi ketegangan militer di Semenanjung Korea dan mewujudkan keharmonisan serta perdamaian Kawasan.

**Kata Kunci** : *Security Dilemma*, Deklarasi Panmunjom, Kepentingan Nasional, Keamanan Internasional, Semenanjung Korea

#### **Abstract**

*The divided of the Korean Peninsula into two parts with differences in ideologies was the cause of the Korean War in 1950. Various ways were already used to quell the tensions that had been going on for 65 years and many agreements were produced but, still failed. Until in 2018 the Panmunjom Declaration was agreed upon by both countries. This study explains why South Korea approved and signed the Panmunjom Declaration. The method used in this study is qualitative research using two data sources, primary and secondary in the form of books, articles and reports. The theory used are Theory of National Interest and International Security with the concept of Security Dilemma. The results of this study show that the reasons of South Korea approved the Panmunjom Declaration was the desire to realize Korean unification, reduce military tensions on the Korean Peninsula and realize regional harmony and peace.*

**Keywords :** *Security Dilemma, Panmunjom Declaration, National Interest, International Security, Korean Peninsula*

## PENDAHULUAN

Korea Utara dan Korea Selatan pada mulanya merupakan satu negara. Namun, setelah kemerdekaan Korea pada tahun 1945 pihak Amerika Serikat dan Uni Soviet membawa pasukan mereka masing-masing dan mendirikan pemerintahan militer mereka. Amerika Serikat mendirikannya di bagian Selatan dan Uni Soviet mendirikannya di bagian Utara dengan tujuan untuk membantu mengusir pasukan-pasukan imperialis Jepang yang kemudian menjadi titik awal perpecahan Korea (Kbs.co.kr n.d.). Terpecahnya Korea ini juga merupakan dampak dari ketegangan Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dan sekaligus menjadi momen terbaginya Semenanjung Korea menjadi dua (era.id 2019).

Setelah Semenanjung Korea terbagi menjadi dua, masing-masing negara berkembang dengan ideologi yang berbeda. Korea Utara dengan ideologi Komunisnya yang berasal dari Uni Soviet dan Korea Selatan dengan ideologi demokrasinya. Perbedaan ideologi ini akhirnya memicu terjadinya Perang Korea pada tahun 1950 (Kbs.co.kr n.d.). Perang Korea pun mampu menarik perhatian PBB yang langsung turun tangan mengirim pasukannya untuk meredakan perang tersebut dan berhasil merubah keadaan dan memberikan sedikit harapan untuk terwujudnya reunifikasi Korea. Namun, China yang merupakan sekutu Uni Soviet dan Korea Utara ikut campur membuat keadaan memburuk

lagi hingga akhirnya dibuatnya dan ditandatanganinya kesepakatan gencatan senjata pada 27 Juli 1953 (Kbs.co.kr n.d.)

Tahun 1998 merupakan upaya pertama unifikasi yang diusahakan oleh Presiden Korea Selatan Kim Dae Jung yang berhasil membawa Presiden Korea Utara Kim Jong Il untuk ikut berunding mengenai unifikasi Korea dengan membuat kebijakan *Sunshine Policy* (Megananda 2020). *Sunshine Policy* merupakan kebijakan yang dibuat oleh presiden Korea Selatan Kim Dae Jung yang mampu membuka pertemuan dan pembicaraan antara Korea Selatan dan Korea Utara secara langsung tanpa campur tangan Amerika Serikat dan negara-negara lain yang puncak pertemuan terjadi pada Tahun 2000 di Pyongyang, Korea Utara (Kwon 2014, 06). Pertemuan antar Korea atau *inter-Korean Summit* yang kedua dilaksanakan tepat setelah tujuh tahun dari pertemuan pertama yaitu pada tahun 2007 yang dilaksanakan di Pyongyang dan dihadiri oleh Presiden Korea Selatan yang baru, Roh Moo Hyun dan Presiden Korea Utara Kim Jong Il pada tanggal 2-4 Oktober 2007. Pertemuan ini membahas mengenai perkembangan hubungan antar Korea, perdamaian di Semenanjung Korea dan unifikasi Korea (kbs.co.kr n.d.).

Pada 2-4 Oktober 2007 pertemuan tersebut dilakukan oleh presiden terpilih yang baru, Roh Moo Hyun yang lebih berfokus pada kerja sama di sektor ekonomi dengan Korea Utara tapi tetap melanjutkan *Sunshine*

*Policy* yang telah dibuat oleh Presiden terdahulu, Kim Dae Jung (Nidia 2017, 04).—*Sunshine Policy* yang dianggap terlalu menguntungkan pihak Korea Utara dan bersifat kurang tegas. Hal ini dibuktikan dengan pihak Korea Utara yang mulai melakukan uji coba nuklir yang diduga akibat dari bantuan yang terus diberikan kepada Korea Utara oleh Korea Selatan sehingga, kebijakan ini dipertimbangkan lagi untuk dilanjutkan (Nidia, 2017, p. 7). Presiden Korea berikutnya yang terpilih yaitu Lee Myung Bak memberlakukan kebijakan yang baru dan menghentikan *Sunshine Policy* (Liviamanda, Hara, and Indriastuti 2012, 04). *Sunshine Policy* dihentikan pada tahun 2010 dan digantikan dengan kebijakan *Hardline Policy* (Nidia, 2017, p. 12). Namun, kebijakan ini pun juga dinilai gagal (Joint US-Korea Academic Studies n.d., 05). Tindakan yang dilakukan Presiden Lee Myung Bak adalah berupa pemberhentian hubungan perdagangan dan lebih memperkuat kekuatan militer dengan bekerjasama dengan Amerika Serikat (Nidia, 2017, p. 8). Uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara pada tahun 2009 serta serangan yang dilakukan kepada Kapal Cheonan milik Korea Selatan pada tahun 2010 dan menewaskan kurang lebih 46 orang merupakan dampak yang di timbulkan akibat dari pemutusan hubungan kerjasama dengan Korea Utara dan lebih memihak kepada Amerika Serikat (sindonews.com, 2015).

Setelah era kepemimpinan Presiden Lee Myung Bak, presiden berikutnya yang memimpin Korea Selatan adalah Presiden terpilih, Park Geun Hye yang memimpin dari tahun

2013-2017 dengan membawa kebijakan baru yaitu, *Trustpolitik policy* (Munawwarah, 2018, p. 4). Presiden Park Geun Hye menyampaikan bahwa *trust* atau rasa saling percaya antara Korea Utara dan Korea Selatan merupakan dasar untuk terwujudnya Unifikasi Korea (Kang 2014, 04). Kebijakan inipun tidak berhasil mengurangi ketegangan yang terjadi dan justru menimbulkan rasa ketidakpercayaan (Cheon, 2013). Dalam kebijakan *Trustpolitik* ini terdapat tiga premis yaitu *Trust Politic*, *trust diplomatic* dan *trust process* (Cheon, 2013). *Trust Politic* merupakan cara dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara dan menghadapinya melalui cara negosiasi. *Trust Diplomatic* merupakan upaya untuk dapat membangun dan menciptakan hubungan serta menjalin kerjasama berdasarkan prinsip kepercayaan. *Trust Process* merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk membangun rasa saling percaya tersebut yang telah dilakukan Presiden Park dengan memberikan bantuan untuk masyarakat miskin dan terlantar Korea Utara, pertukaran dan kerjasama antar Korea baik dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya dan juga mendirikan komunitas pasar tunggal di Semenanjung Korea yang diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak (Cheon, 2013).

Tahun 2017-2022 merupakan periode baru bagi Korea Selatan dengan pemimpin yang baru, Moon Jae In yang memiliki arah kebijakan condong ke diplomasi dengan metode bertatap muka yang memiliki tujuan utama untuk menyadarkan kembali hubungan antara Korea yang telah

lama memburuk (Moon, 2018). Tahun 2018 merupakan titik awal menuju tercapainya unifikasi Korea dengan diadakannya KTT antar-Korea yang dilaksanakan pada 27 April 2018 di Rumah Perdamaian Desa Panmunjeom. Kedua pemimpin negara bertemu di Desa Panmunjeom untuk melakukan perundingan lebih lanjut mengenai perjanjian perdamaian di Semenanjung Korea (Hidriyah 2009). Sebelum KTT ini diadakan, situasi yang ada di Semenanjung Korea masih sangatlah panas akibat dari Korea Utara yang mengancam menggunakan nuklir yang mereka ciptakan (Iv et al. 2018, 22). Hingga pada akhirnya KTT antar Korea di tahun 2018 yang merupakan agenda lanjutan dari KTT antar-Korea pada 13-15 Juni 2000 yang dilaksanakan di Pyongyang, Korea Utara dan dihadiri oleh kedua pemimpin negara. Dalam setiap pertemuannya, Korea Utara dan Korea Selatan terus berusaha mencapai perdamaian dengan berusaha membangun Rezim Perdamaian dan membangun rasa saling percaya untuk mencapai perdamaian abadi di Semenanjung Korea (Kartini, 2018).

Pada 27 April 2018 merupakan tanggal ketika kedua pemimpin negara Korea Utara dan Korea Selatan bertemu dan menandatangani Deklarasi Panmunjom. Berikut poin-poin penting dalam Deklarasi Panmunjom (Dikarma, 2018) :

1. Kedua Korea setuju untuk menyatakan Perang Korea berakhir, yang telah tertunda sejak gencatan senjata pada tahun 1953.
2. Kedua Korea menyetujui untuk menyelenggarakan dialog dan

negosiasi dalam berbagai bidang serta mengambil langkah-langkah yang nyata dan aktif untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah tertuang dalam KTT.

3. Kedua Korea menyetujui untuk membangun gedung Kantor Penghubung Gabungan antar kedua negara yang berfungsi sebagai tempat bagi wakil kedua negara dalam berkonsultasi dan melakukan kerjasama.
4. Kedua negara sepakat untuk saling bekerjasama, bertukar kunjungan dan melakukan kontak yang lebih aktif untuk mewujudkan rasa rekonsiliasi nasional dan persatuan.
5. Kedua Korea menyetujui untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan akibat dari perpecahan kedua Korea dengan mempertemukan kembali keluarga yang terpisah dan melibatkan Palang Merah Korea didalamnya.
6. Kedua Korea berkomitmen untuk berupaya dalam mengurangi ketegangan militer dan menghilangkan meletusnya perang antara kedua negara.
7. Kedua Korea akan secara aktif bekerjasama untuk membentuk rezim perdamaian di Semenanjung Korea.
8. Kedua Korea menyetujui untuk melakukan pelucutan senjata nuklir dan mewujudkan denuklirisasi.

Penelitian ini akan membahas mengenai mengapa pihak Korea Selatan yang dipimpin oleh Presiden Moon Jae In saat ini menyetujui

deklarasi perdamaian Panmunjom pada tahun 2018 yang dapat membawa perdamaian dan unifikasi di Semenanjung Korea mengingat kedua Korea hingga saat ini masih belum menemukan titik cerah untuk mencapai perdamaian yang sesungguhnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk menjelaskan atau menggambarkan hasil dari penelitian mengenai alasan Korea Selatan dalam meratifikasi Deklarasi Panmunjom pada tahun 2018 dalam bentuk narasi tanpa menggunakan perhitungan lainnya yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan (Levy, 2009, p. 14). Obyek penelitian atau fokus penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah alasan atau latar belakang Korea Selatan meratifikasi Deklarasi Panmunjom pada tahun 2018

Sumber data merupakan subjek yang digunakan oleh penulis untuk dapat mencari informasi atau referensi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian yang didasarkan pada kejadian ilmiah yang terjadi, selain itu penulis juga harus memahami data yang didapatkan. Sumber data dapat didapatkan dengan dua cara yaitu, data primer dan data sekunder (Hardani. Ustiawaty, 2020).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan oleh peneliti didapat melalui website resmi pemerintah Korea Selatan. Untuk data sekunder, peneliti mendapatkan data yang berasal dari buku, jurnal,

dokumen, pernyataan tokoh negara yang dikutip oleh artikel-artikel media massa yang memiliki tema pembahasan yang sama dengan penelitian ini. Data atau informasi yang diperoleh melalui jurnal dan website yang dilakukan oleh peneliti berasal dari website dan jurnal yang kredibel. Peneliti mendapatkan data dan informasi yang digunakan untuk menunjang penelitian didapat melalui sumber yang berasal baik dari Korea Selatan maupun dari sumber-sumber negara lain guna menjaga keobjektifitasan data dari penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data Telaah Pustaka atau *Library Research* yang merupakan teknik pengumpulan data melalui sumber-sumber informasi seperti buku, jurnal, website resmi serta berita-berita online dari sumber yang kredibel yang memiliki kesesuaian dengan tema penelitian. Penulis menggunakan teknik analisis data Reduksi Data yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber referensi seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu atau melalui informasi online. Reduksi data dilakukan dengan cara menelusuri sumber dengan tema yang sama kemudian di olah kembali. Teknik analisis pada data kualitatif penelitian ini disajikan dengan menggunakan uraian atau penjelasan yang bersifat naratif untuk menggambarkan data dari penelitian yang telah dilakukan dan didapatkan oleh peneliti. Verifikasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan, memilah kemudian menarik kesimpulan data sekunder yang telah didapat dari sumber-sumber yang berbeda baik sumber

yang berasal dari Korea Selatan maupun sumber yang berasal dari negara-negara lain sehingga data yang didapat menjadi valid dan kredibel.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan sebelum Deklarasi Panmunjom

Sejak abad ke-20 Semenanjung Korea berada dibawah kekuasaan Kekaisaran Jepang namun, keadaan baerubah ketika Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia 2 yang berakibat wilayah bekas jajahan mereka diambil alih oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat dan tepat pada Agustus 1945 Korea resmi terbagi menjadi 2 bagian yaitu Korea Utara dengan pengaruh Rusia dan Korea Selatan dengan pengaruh Amerika Serikat (Virdita, 2021). Upaya Reunifikasi pertama kali telah diupayakan pada 4 Juli 1972 melalui Pernyataan Bersama yang dihadiri oleh kepala badan intelejen Korea Selatan, Lee Hu Rak dan wakil perdana menteri Korea Utara, Park Sung Chol yang diadakan di Panmunjom secara rahasia (Kbs.co.kr n.d.). Namun, hasil dari pertemuan bersama tersebut tidak menunjukkan kemajuan yang baik melainkan menyebabkan seringnya terjadi perdebatan hingga fitnah antara kedua negara. Pada 13 Juni 2000 menjadi pertemuan pertama yang resmi antara kedua negara yang dihadiri langsung oleh kedua pemimpin negara yaitu Kim Jong Il dan Kim Dae Jung yang diadakan di Pyongyang, Korea Utara untuk mengadakan KTT yang akhirnya

mencapai pernyataan bersama pada 15 Juni 2000 yang juga memiliki arah tujuan yang sama dengan kebijakan Korea Selatan yaitu, *Sunshine Policy*. *Sunshine Policy* yang diperkenalkan oleh Presiden Kim Dae Jung ini lebih memfokuskan pada kerjasama dan dialog bilateral demi keuntungan bersama serta untuk merekonsiliasi keadaan politik kedua negara tersebut (Kwon, 2014).

*Sunshine Policy* juga bertujuan untuk mengenalkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri kepada Korea Utara dengan Korea Selatan turut serta membantu memberikan bantuan dalam bidang ekonomi salah satunya dengan mendirikan *Kaesong Industrial Complex* (KIC) pada tahun 1998 yang terletak di Pyongyang, Korea Utara yang bertujuan untuk membuat pusat kawasan industry di Korea Utara yang mampu menghasilkan produk-produk dengan tenaga kerja dari Korea Utara (Anindita, 2017). Kebijakan ini masih terus berlanjut hingga Era kepemimpinan presiden berikutnya yaitu Roh Moo Hyun (Nidia 2017, 04). Kebijakan *Sunshine Policy* akhirnya diberhentikan ketika presiden berikutnya terpilih yaitu, Lee Myung Bak yang menilai kebijakan *Sunshine Policy* ini gagal karena terlalu menguntungkan pihak Korea Utara yang kemudian kebijakan tersebut dihapus dan digantikan dengan kebijakan baru yaitu, *Hardline Policy* pada tahun 2010 (Liviamanda et al., 2012, p. 4). Tindakan yang dilakukan beliau adalah dengan memberhentikan hubungan perdangan dan lebih memperkuat kekuatan militer dan bekerjasama dengan Amerika Serikat (Nidia 2017, 08). Uji coba nuklir yang

dilakukan Korea Utara pada tahun 2009 serta serangan yang dilakukan kepada Kapal Cheonan milik Korea Selatan pada tahun 2010 dan menewaskan kurang lebih 46 orang merupakan dampak yang di timbulkan akibat dari pemutusan hubungan kerjasama dengan Korea Utara dan lebih memihak kepada Amerika Serikat (sindonews.com 2015) sehingga kebijakan ini pun juga dinilai gagal (Joint US-Korea Academic Studies, n.d., p. 5).

Setelah era kepemimpinan Presiden Lee Myung Bak berakhir, presiden berikutnya yang terpilih, Park Geun Hye membawa kebijakan baru yaitu, *Trustpolitik Policy* yang beralasan bahwa untuk mencapai reunifikasi maka diperlukan adanya rasa saling percaya antar kedua negara dan melalui kebijakan ini diharapkan hubungan kedua negara menjadi lebih baik dan mampu mewujudkan reunifikasi (Kang 2014, 04). Dalam kebijakan *Trustpolitik* ini terdapat tiga premis yaitu *Trust Politic*, *trust diplomatic* dan *trust process* (Cheon, 2013) *Trust Politic* merupakan cara dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara dan menghadapinya melalui cara negosiasi. *Trust Diplomatic* merupakan upaya untuk dapat membangun dan menciptakan hubungan serta menjalin kerjasama berdasarkan prinsip kepercayaan. *Trust Process* merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk membangun rasa saling percaya tersebut yang telah dilakukan Presiden Park dengan memberikan bantuan untuk masyarakat miskin dan terlantar Korea Utara, pertukaran dan kerjasama antar Korea baik dalam bidang sosial,

ekonomi dan budaya dan juga mendirikan komunitas pasar tunggal di Semenanjung Korea yang diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak (Cheon, 2013).

Kebijakan inipun juga tidak berhasil mengurangi ketegangan yang terjadi dan justru menimbulkan rasa tidak percaya yang terbukti melalui pendapatan Korea Utara yang didapat melalui Kawasan Industri Kaesong (KIC) yang tujuan didirikannya adalah untuk meningkatkan kerjasama kedua negara serta membantu reformasi perekonomian ternyata digunakan untuk pendanaan proyek senjata nuklir hingga akhirnya pada tahun 2016 Presiden Park memutuskan untuk menutup kawasan industri tersebut (Zulkarni, 2018).

## 2. Isi Deklarasi Panmunjom

Pada bulan April 2018 tepatnya pada tanggal 27 merupakan hari ketika pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un dan pemimpin Korea Selatan, Moon Jae In menyepakati Deklarasi Panmunjom yang sebelumnya telah mereka susun yang didalamnya terdiri dari beberapa kesepakatan yang berhubungan dengan reunifikasi Korea (Jawapos.com, 2018). Pertemuan antar kedua negara tersebut diselenggarakan di Gedung Perdamaian, Zona Demiliterisasi, Panmunjom, Korea Selatan (Riza, 2018). Deklarasi tersebut memuat hasil diskusi dan komitmen kedua negara untuk menjalin hubungan kembali dan berkomitmen dalam upaya perdamaian dan Reunifikasi Korea, berikut isi dari Deklarasi Panmunjom (Changhee Kim, 2018):

1. Korea Utara dan Korea Selatan memepersatukan kembali

hubungan darah rakyat antar Korea dan membawa kemakmuran dan unifikasi Korea yang dipimpin oleh Korea dengan memfasilitasi terobosan dan inovasi baru dalam hubungan antar-korea serta meningkatkan dan membina hubungan antar-korea yang merupakan keinginan seluruh bangsa dan merupakan kepentingan yang penting yang tidak dapat ditunda-tunda lagi.

- a. Korea Selatan dan Korea Utara menegaskan prinsip untuk menentukan nasib dan takdir Bangsa Korea atas kemauan mereka dan sepakat untuk menghadirkan momen yang penting bagi peningkatan hubungan antar-Korea dengan sepenuhnya menerapkan semua perjanjian dan deklarasi yang ada dan yang telah diadopsi oleh kedua belah pihak sejauh ini.
- b. Korea Utara dan Korea Selatan menyetujui untuk melangsungkan dialog dan negosiasi tingkat tinggi mengenai berbagai bidang serta mengambil langkah-langkah aktif dari implementasi kesepakatan yang telah dicapai pada saat KTT
- c. Korea Utara dan Korea Selatan menyetujui untuk mendirikan kantor penghubung bersama dengan menempatkan perwakilan dari kedua negara di wilayah Gaeseong untuk memfasilitasi konsultasi antar kedua negara melalui pihak yang berwenang.
- d. Korea Utara dan Korea Selatan menyetujui untuk saling mendorong kerjasama, pertukaran, kunjungan, dan kontrak yang lebih aktif di semua tingkatan untuk meremajakan rasa rekonsiliasi dan persatuan nasional. Antara Korea Utara dan Korea Selatan akan mendorong suasana persahabatan dan kerjasama dengan lebih aktif lagi diantaranya pertemuan pada 15 Juni yang dihadiri oleh pemerintah pusat dan daerah, parlemen, partai politik, serta organisasi sipil. Kedua negara juga sepakat untuk mengikuti ajang olahraga internasional Asian Games 2018.
- e. Korea Utara dan Korea Selatan sepakat untuk berusaha menyelesaikan permasalahan mengenai kemanusiaan yang terjadi akibat dari perpecahan kedua negara dan untuk mengadakan pertemuan Palang Merah Antar-Korea serta mempertemukan keluarga yang terpisah.
- f. Korea Utara dan Korea Selatan sepakat untuk secara aktif mengimplementasikan proyek-proyek yang telah disepakati sebelumnya dalam Deklarasi 4 Oktober

2007, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan kemakmuran bersama.

2. Korea Utara dan Korea Selatan melakukan upaya bersama untuk mengurangi ketegangan militer akut dan praktis menghilangkan bahaya perang di Semenanjung Korea. Mengurangi ketegangan militer dan menghilangkan bahaya perang yang merupakan tantangan yang sangat signifikan yang terkait langsung dengan nasib rakyat Korea dan juga tugas penting dalam menjamin kehidupan mereka yang damai dan juga tugas yang penting dalam menjamin kehidupan mereka yang damai dan stabil.

a. Korea Utara dan Korea Selatan menyetujui untuk sepenuhnya untuk menghentikan segala bentuk tindakan berselisih satu sama di setiap wilayah baik darat, udara dan laut yang menjadi sumber ketegangan konflik militer. Kedua negara sepakat untuk mengubah Zona Demiliterisasi menjadi Zona Perdamaian dengan menghentikan semua tindakan berselisih dengan cara apapun yang digunakan termasuk penyiaran melalui penguas suara dan distribusi selebaran mulai tanggal 1 Mei tahun 2018.

b. Korea Utara dan Korea Selatan sepakat untuk merancang skema untuk

mengubah area yang ada disekitar Garis Perbatasan bagian Utara yang terletak di Laut Barat menjadi zona perdamaian maritim untuk mencegah terjadinya bentrok antar militer dan menjamin kegiatan penangkapan ikan yang aman.

c. Korea Utara dan Korea Selatan sepakat untuk mengambil berbagai langkah kemiliteran untuk memastikan kerjasama timbal balik, pertukaran, kunjungan dan kontak yang aktif. Keduabelah pihak menyetujui untuk sering mengadakan pertemuan antar otoritas militer, termasuk Pertemuan Menteri Pertahanan dalam rangka untuk segera mendiskusikan dan menyelesaikan permasalahan kemiliteran yang muncul diantara kedua negara tersebut. Dalam hal ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pembicaraan kemiliteran dengan tingkat jenderal terlebih dahulu yang dimulai pada bulan Mei.

3. Korea Utara dan Korea Selatan akan aktif bekerjasama dalam membangun rezim perdamaian yang permanen di Semenanjung Korea yang tidak boleh ditunda lagi.

a. Korea selatan dan Korea Utara menegaskan kembali Perjanjian non-agresi yang

- menghalangi penggunaan kekuatan dalam bentuk apapun terhadap satu sama lain serta menyetujui untuk secara ketat mematuhi perjanjian ini.
- b. Korea Selatan dan Korea Utara menyetujui untuk melakukan pelucutan senjata secara bertahap untuk mengurangi ketegangan militer sekaligus membangun kepercayaan dalam bidang militer.
  - c. Untuk memperingati 65 tahun gencatan senjata, Korea Selatan dan Korea Utara sepakat untuk secara aktif melaksanakan pertemuan tiga negara yang terdiri dari Korea Selatan, Korea Utara serta Amerika Serikat atau pertemuan 4 negara yang juga melibatkan China didalamnya dengan tujuan untuk menyatakan berakhirnya perang. Mengubah gencatan senjata menjadi perjanjian damai serta membangun rezim perdamaian yang permanen.
  - d. Korea Selatan dan Korea Utara menegaskan tujuan bersama mereka untuk diwujudkan melalui denuklirisasi secara lengkap, Semenanjung Korea yang bebas nuklir, Korea Selatan dan Korea Utara berbagi pandangan bahwa langkah-langkah yang diprakarsai oleh Korea Utara sangat berarti dan penting untuk denuklirisasi Semenanjung

Koera dan menyetujui untuk melaksanakan peran serta tanggung jawab masing-masing. Korea Selatan dan Korea Utara menyepakati untuk secara aktif mencari dukungan dan kerjasama komunitas internasional untuk tindakan denuklirisasi Semenanjung Korea.

Melalui isi Deklarasi Panmunjom yang telah dijabarkan dapat dilihat bahwa kedua belah pihak memiliki sikap yang positif terhadap Deklarasi Panmunjom yang mereka percaya dapat membawa Bangsa Korea menjadi satu dan menjadi lebih baik lagi terbukti dari kedua belah pihak yang telah menandatangani deklarasi tersebut.

### **3. Alasan Korea Selatan Menyetujui Deklarasi Panmunjom**

Kepentingan nasional tentunya menjadi dasar dari suatu negara dalam bertindak dan menjadi bagian terpenting dari suatu negara yang dapat juga diartikan sebagai tujuan utama suatu negara oleh karena itu untuk dapat memenuhi dan mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan adanya suatu kekuatan yang dapat berupa kebijakan yang nantinya berfungsi untuk mengendalikan dan mencapai tujuan utama dari kepentingan nasional tersebut (Anantha & Monica, 2019, p. 03). Setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing begitu pula Korea Utara dan Korea selatan. Masing-masing dari mereka memiliki kepentingan nasional mreka

masing-masing yang kemudian akhirnya mereka tuangkan dan diskusikan bersama sehingga menghasilkan Deklarasi Panmunjom yang bertujuan untuk mencapai dan menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea yang ketegangan telah berlangsung selama 65 tahun lamanya.

Ketegangan ini kemudian berkembang menyebabkan munculnya permasalahan keamanan yaitu Dilema Keamanan atau *Security Dilemma* yang juga merupakan dampak dari kepemilikan nuklir Korea Utara. Kepemilikan nuklir sendiri secara umum sudah mampu menyebabkan munculnya isu Dilema Keamanan tersebut (Alaydrus, 2021). *Security Dilemma* menggambarkan mengenai suatu keadaan ketika suatu negara memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negaranya yang kemudian mempengaruhi negara lain (Suharman, 2019, p. 05). Jervis (1985) juga menjelaskan bahwa apabila keadaan *offense* suatu negara meningkat, maka akan dapat menimbulkan *security dilemma* di kawasan sekitarnya yang kemudian diikuti dengan persaingan persenjataan atau alutsista atau bahkan dapat memunculkan perang yang sesungguhnya, tetapi dapat dicegah apabila keadaan *defense* lebih mendominasi dibandingkan dengan keadaan *offense* (Fariani & Sholeh, 2020, p. 122).

Uji coba yang terus-terusan dilakukan oleh Korea Utara ini menyebabkan kawasan Asia Timur bahkan dunia internasional

mengalami dilema keamanan sementara pihak Korea Utara mengaku bahwa nuklir yang mereka ciptakan adalah hanya untuk penelitian dan meningkatkan sistem keamanan negara mereka yang justru malah berdampak ketegangan di kawasan Asia Timur hingga internasional (Shin, 2018). Keadaan tersebut yang kemudian menjadi alasan disetujuinya Deklarasi Panmunjom seperti yang telah tertuang dalam Deklarasi Panmunjom di poin ke dua bahwa, **Korea Utara dan Korea Selatan akan bekerjasama untuk mengurangi ketegangan militer** yang terjadi di Semenanjung Korea baik dalam lingkup darat, laut maupun udara. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketegangan militer diantaranya dengan saling melakukan kunjungan yang juga dihadiri oleh menteri pertahanan untuk mendiskusikan permasalahan kemiliteran yang akan mereka hadapi bersama kedepannya, mengubah Zona Demiliterisasi menjadi Zona Perdamaian begitu pula di bagian Laut Barat diubah menjadi Zona Perdamaian Maritim yang digunakan untuk menjaga perdamaian dan mencegah terjadinya penjarahan hasil laut yang ilegal (Reuters.com, 2018). Pelucutan senjata secara bertahap juga merupakan upaya kedua negara untuk mengurangi ketegangan militer yang terjadi antar Korea (Kartini, 2018, p. 7). Selang lima bulan setelah kedua negara menyetujui dan menandatangani Deklarasi Panmunjom, pada bulan September

2018 menghasilkan Deklarasi Pyongyang yang merupakan salah satu wujud nyata dari hasil Deklarasi Panmunjom yang membahas lebih fokus mengenai denuklirisasi Korea Utara demi keamanan dan perdamaian bersama sesuai dengan komitmen yang mereka buat bersama (Antara, 2018). Apabila denuklirisasi ini dapat terwujud maka perdamaian yang diharapkan oleh Korea Selatan akan terwujud begitu juga dengan permasalahan keamanan juga akan dapat terselesaikan.

Presiden Moon Jae in juga menyampaikan, “Ketegangan di Semenanjung Korea perlu segera di selesaikan dan perlunya untuk membangun kembali rasa saling percaya antara Korea Utara dan Korea Selatan melalui diskusi. Korea Utara harus menghentikan Tindakan provokasi nuklirnya sehingga ketegangan militer dapat terpecahkan. Korea Selatan akan bekerjasama dengan komunitas internasional untuk mencari dan menemukan solusinya untuk menutup program pengembangan nuklir Korea Utara sehingga ketegangan militer terselesaikan dan dapat menciptakan rezim perdamaian” (Hyun Jung, 2017).

Alasan berikutnya adalah ingin **mewujudkan dan menciptakan rezim perdamaian yang permanen** di Kawasan Semenanjung Korea. Melalui kunjungan Presiden Moon Jae In ke Pyongyang, Korea Utara pasca penandatanganan Deklarasi Panmunjom, Presiden Moon mendapat kesempatan untuk berpidato dan melalui kesempatan tersebut Presiden Moon selaku

Presiden Korea Selatan menyampaikan cita-citanya untuk dapat mewujudkan perdamaian abadi antar Korea (Voaindonesia.com, 2018). Kunjungan ke Pyongyang, Korea Utara ini juga merupakan salah satu upaya Korea Selatan dan Korea Utara untuk mencapai perdamaian abadi melalui diskusi secara terus menerus dan bertahap perihal isu-isu dan permasalahan yang terjadi antar dua negara tersebut, melalui diskusi ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi Korea selatan dan Korea Utara untuk dapat memperkuat rasa saling percaya merka satu sama lain (Kartini, 2018, pp. 6-7). Melalui Deklarasi Panmunjom juga mereka berkomitmen untuk berusaha dalam menghapuskan perang diantara Korea Selatan dan Korea Utara yang disaksikan langsung oleh masyarakat baik Korea Selatan maupun Korea Utara bahkan hingga seluruh dunia menjadi saksi dari komitmen kedua pemimpin negara tersebut (Kartini, 2018, p. 7).

Moon Jae In juga membuat *Three Goals* yang ditujukan untuk mencapai pedamaian abadi di Semenanjung Korea yang merupakan kebijakan jangka Panjang yang bertujuan untuk mencapai dan meningkatkan keamanan serta kemakmuran di Semenanjung Korea (unikorea.go.kr, n.d.) :

1. *Peace.* Perdamaian merupakan nilai yang harus diutamakan dan menjadi prioritas utama sebagai dasar untuk kemakmuran bersama.

2. *Spirit of 'Mutual Respect'*. Korea Utara dan Korea Selatan akan bekerjasama untuk mewujudkan kemakmuran bersama.
3. *'Open' Policy*. Kebijakan akan sepenuhnya terselesaikan melalui bantuan aspirasi dan interaksi public untuk memastikan kebijakan tersebut dipahami dan disusun berdasarkan keinginan masyarakat.

Untuk dapat mencapai perdamaian yang abadi, **Unifikasi Korea** juga menjadi salah satu agenda Korea Selatan. Melalui pidato Berlin Initiative yang disampaikan di Berlin pada 6 juli 2017 di Körber Foundation, Presiden Moon Jae In berkesempatan untuk menyampaikan keinginannya untuk dapat mewujudkan unifikasi Korea. Dalam pidato tersebut Presiden Moon Jae In menyampaikan bahwa Unifikasi merupakan salah satu proses yang penting dalam mencapai dan mewujudkan perdamaian (Hyun Jung, 2017). Melalui kebijakan *Only Peace* yang beliau sampaikan pada kesempatan tersebut beliau menjelaskan bahwa, "Unifikasi merupakan proses ketika kedua pihak yang terlibat bekerjasama untuk mencari konsistensi serta kemakmuran dan memulihkan kembali komunitas nasional. Apabila perdamaian telah tercipta maka unifikasi akan dapat terwujud dengan sendirinya melalui perjanjian yang dibuat oleh pihak Utara dan Selatan" (Hyun Jung, 2017). Langkah pertama yang

dilakukan Presiden Moon Jae In untuk mencapai unifikasi tersebut adalah dengan membangun hubungan persahabatan yang baik dengan Korea Utara melalui Olimpiade Pyeongchang di tahun 2018 yang juga melibatkan Kementerian Unifikasi Korea yang menghasilkan kesepakatan Kerjasama berupa tim gabungan untuk jenis olahraga hoki putri (Fifflied, 2018). Kementerian Unifikasi sudah didirikan pada tahun 1969 yang bertujuan untuk mempromosikan mengenai penyatuan kembali Korea (Unikorea.go.kr, n.d.).

Melalui dibentuknya Kementerian Unifikasi tersebut dapat kita ketahui bahwa upaya untuk unifikasi Korea sudah ada sejak lama namun, dikarenakan banyaknya halangan dan rintangan baik internal maupun eksternal menyebabkan tercapainya Unifikasi terus terhambat. Untuk mencapai perdamaian yang abadi serta unifikasi memang memerlukan proses untuk mencapainya mengingat di Semenanjung Korea terdapat banyak permasalahan yang harus diselesaikan satu persatu dan secara bertahap. Oleh karena itu melalui Deklarasi Panmunjom yang merupakan produk dari sebuah kepentingan nasional berupa kebijakan yang melibatkan kedua pihak Utara dan Selatan bersama-sama mereka saling bekerjasama dan berkomitmen untuk dapat mewujudkannya bersama.

## KESIMPULAN

Penelitian ini membahas mengenai alasan Korea Selatan menyetujui Deklarasi Panmunjom di tahun 2018. Terdapat tiga alasan utama yang menjadi dasar dari disetujuinya Deklarasi ini oleh Presiden Moon Jae In selaku pemimpin Korea Selatan yang saat itu tengah menjabat. Alasan-alasan tersebut juga merupakan cita-cita Presiden Moon Jae In. Meskipun terdapat banyak tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan secara bertahap namun, Presiden Korea Selatan tetap berusaha untuk mewujudkan cita-citanya melalui Deklarasi Panmunjom yang telah dibuat serta disetujui oleh Korea Selatan dan Korea Utara.

Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, disusun dan diupayakan oleh Korea Selatan tersebut merupakan perwujudan untuk menciptakan keamanan dalam bentuk *defensive* atau bertahan karena melalui peroduk

kepentingan nasional mereka yang berupa kebijakan-kebijakan yang dibuat dan telah disetujui oleh kedua negara tentunya memiliki sifat mengikat dan Korea Selatan sama sekali tidak melakukan penyerangan apapun kepada pihak Korea utara dan justru mengajak Korea Utara untuk bekerjasama dalam mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea bersama. Selain itu tindakan yang dilakukan Korea Selatan dalam meratifikasi Deklarasi Panmunjom juga merupakan perwujudan dalam pemenuhan kepentingan nasional mereka terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan baik bagi masyarakatnya maupun bagi negaranya mengingat Korea Utara yang masih didapati beberapa kali secara diam-diam tetap mengembangkan persenjataan nuklir mereka yang dapat menjadi ancaman bagi Korea Selatan yang merupakan negara terdekatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Alaydrus, M. Z. (2021). *Ancaman Nuklir dan Masa Depan Keamanan Global*. Kompasiana.Com.

<https://www.kompasiana.com/mzeinalaydrus1064/61655d5306310e135d373ff5/ancaman-nuklir-dan-masa-depan-keamanan-global>

Anantha, I. G., & Monica, E. M. (2019). *Studi diplomasi dan keamanan*. 11.

Antara. (2018). *Pemimpin Korsel-Korut Tandatangani Dokumen di Pyongyang*. Mediaindonesia.Com. <https://mediaindonesia.com/internasional/185391/pemimpin-korsel-korut-tandatangani-dokumen-di-pyongyang>

Changhee Kim. (2018). Peace Settlement of the Korean Peninsula and 4.27 Panmunjeom Declaration. In *Journal of Korean Political and Diplomatic History* (Vol. 40, Issue 1). <https://doi.org/10.18206/kapdh.40.1.201808.119>

Cheon, S. (2013). Trust - The Underlying Philosophy of the Park Geun-Hye Administration. *Center for Strategic & International Studies*.

Dikarma, K. (2018). *Ini Ringkasan Isi*

*Deklarasi Dua Pemimpin Korea*. Republica.Co.Id.

<https://www.republika.co.id/berita/p7vy9m284/ini-ringkasan-isi-deklarasi-dua-pemimpin-korea>

era.id. (2019). *Perang Korea dan Terbelahnya Wilayah Utara dan Selatan*. Era.Id.

<https://era.id/afair/24760/perang-korea-dan-terbelahnya-wilayah-utara-dan-selatan>

Fariani, M., & Sholeh, B. (2020). China ' s Military Increase : A Security Dilemma In Asia Pacific. *Mandala*, 3(2), 120-133.

<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JM/article/download/MJIHIN01/1012>

Fifflied, A. (2018). *North Korea agrees to send athletes to Winter Olympics, South says*. Washingtonpost.Com.

[https://www.washingtonpost.com/world/north-korea-agrees-to-send-athletes-to-winter-olympics-south-says/2018/01/09/56407aa8-f4a9-11e7-9af7-a50bc3300042\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/north-korea-agrees-to-send-athletes-to-winter-olympics-south-says/2018/01/09/56407aa8-f4a9-11e7-9af7-a50bc3300042_story.html)

[http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/outline/outline\\_1940.htm?lang=i](http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/outline/outline_1940.htm?lang=i)

Hyun Jung, B. (2017). *Full text of Moon's speech at the Korber Foundation*.  
<http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170707000032>

Jawapos.com. (2018). *Inilah Isi Deklarasi Panmunjom, Perjanjian Damai Korsel dan Korut*. Jawapos.Com.

Kartini, I. (2018). DEKLARASI PANMUNJOM DAN PROSPEK PERDAMAIAN KOREA DI ERA MOON JAE-IN DAN KIM JONG-UN. *Jurnal Penelitian Politik, LIPI*, 15(726), 1-13.  
<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/731/520>

Kbs.co.kr. (n.d.). *Korean Peninsula A to Z*. Kbs.Co.Kr. Retrieved November 10, 2020, from

kbs.co.kr. (n.d.). *Proses Pelaksanaan [Pertemuan puncak antarKorea tahun 2007]*.  
[http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/summit/summit\\_2007.htm?lang=i](http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/summit/summit_2007.htm?lang=i)

Kwon, P. J. (2014). The Re-evaluation of the Sunshine Policy: Failure or success? *The Public Sphere* 2014!

Liviamanda, D., Hara, A. E., & Indriastuti, S. (2012). Keputusan Korea Utara Membatalkan Upaya Reunifikasi ( North Korea ' S Decision To Cancel Efforts the Korean Reunification ). *Universitas Jember*.  
[https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/13139/DebyLiviamanda-080910101003\\_1.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/13139/DebyLiviamanda-080910101003_1.pdf?sequence=1)

Nidia, D. N. (2017). *SUNSHINE POLICY PADAMASA PEMERINTAHAN PRESIDENT LEE MYUNG BAK*.  
<http://english.president.go.kr/president/presidents/profile.php>

Suharman, Y. (2019). Dilema keamanan dan Respon Kolektif ASEAN Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan. *Intermestic: Journal of International Studies*, 3(2), 127.  
<https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.3>

Unikorea.go.kr. (n.d.). *Ministry Of Unification : Structures*. Unikorea.Go.Kr. Retrieved July 23, 2022, from [https://www.unikorea.go.kr/eng\\_unikorea/about/structure\\_function/structure/](https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/about/structure_function/structure/)

unikorea.go.kr. (n.d.). *Three Goals*.  
Unikorea.Go.Kr. Retrieved July 23,  
2022, from  
[https://www.unikorea.go.kr/eng\\_uni  
korea/policyissues/koreanpeninsula/  
goals/](https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyissues/koreanpeninsula/goals/)

Zulkarni, Z. (2018). PARK GEUN  
HYE MENGENAI A . Trust-Building  
Process. *Universitas Muhamadiyah  
Yogyakarta* Yogyakarta, 32-50.  
[http://repository.umy.ac.id/bitstream  
/handle/123456789/22011/7%29 BAB  
III.pdf?sequence=8&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22011/7%29%20BAB%20III.pdf?sequence=8&isAllowed=y)